KOMUNIKATA57
Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
p-ISSN: 2774-3616
e-ISSN: 2774-3624
diterbitkan oleh
Program Studi Ilmu Komunikasi
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
dibawah pembinaan
APJIKI
Vol. 7, No. 2, Oktober 2026, pp. 94-106

DEKONSTRUKSI KOMUNIKASI POLITIK PASCA-JOKOWI: ANALISIS NARASI 'BOCOR ALUS POLITIK' DALAM JURNALISME INVESTIGASI TEMPO.CO

PENULIS

[1)]Zulkarnain, [2)]Selvi Sofiawati, [3)]Wulan Dwi Pratiwi, [4)]Selvy Maria Widuhung, [5)]Ulviah Muallivah

ABSTRAK

Podcast telah berkembang menjadi salah satu medium komunikasi politik digital yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan dinamika relasi kekuasaan melalui konstruksi narasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi lobi dan negosiasi elit politik dalam Podcast Madilog Forum Keadilan mengenai penggeledahan oleh POLRI yang menjadi perhatian publik pada tahun 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap konten podcast yang meliputi narasi host, argumentasi narasumber, struktur penyajian pesan, serta konteks komunikasi yang dibangun selama diskusi berlangsung. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk representasi komunikasi politik, strategi pembingkaian (*framing*), konstruksi relasi antarelit, serta makna yang dibangun terhadap institusi negara dan aktor politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa podcast merepresentasikan lobi dan negosiasi elit politik sebagai mekanisme komunikasi yang berlangsung melalui simbol, asumsi, dan interpretasi terhadap hubungan antarlembaga negara, sehingga membentuk persepsi publik mengenai konfigurasi kekuasaan di ruang publik digital. Narasi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai praktik komunikasi politik yang membingkai legitimasi, kredibilitas, dan dinamika relasi antarelit. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik digital dengan menunjukkan bahwa podcast merupakan arena representasi politik yang berperan dalam membentuk konstruksi makna atas isu-isu politik kontemporer melalui narasi media digital.

Kata Kunci: Representasi; Komunikasi Politik; Podcast; Lobi Politik; Analisis Isi

ABSTRACT

Podcasts have evolved into a significant medium of digital political communication, serving not only as channels for information dissemination but also as platforms that represent power relations through narrative construction. This study aims to analyze the representation of political elite lobbying and negotiation in the Madilog Forum Keadilan podcast, specifically concerning the police search operation that garnered widespread public attention in 2026. Employing a qualitative approach with content analysis, the study examines the podcast's narrative structure, host discourse, guest arguments, message organization, and the communicative context embedded within the discussion. The analysis identifies patterns of political communication, framing strategies, representations of elite interactions, and the meanings constructed regarding state institutions and political actors. The findings reveal that the podcast represents elite lobbying and negotiation as communicative processes conveyed through symbols, assumptions, and interpretations of inter-institutional relations, thereby shaping public perceptions of power configurations in the digital public sphere. Beyond delivering information, the podcast functions as a form of political communication that frames institutional legitimacy, credibility, and elite political dynamics. This study contributes to the literature on digital political communication by demonstrating that political podcasts constitute an important arena of political representation, constructing public meaning surrounding contemporary political issues through digital media narratives.

Keywords: *Representation; Political Communication; Podcast; Political Lobbying; Content Analysis*

AFILIASI

Prodi, Fakultas: [1,5)]Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, [2,3,4)]Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa
Nama Institusi: [1,5)]Universitas Tama Jagakarsa, [2,3,4)]Universitas Bina Sarana Informatika
Alamat Institusi: [1,5)]Jl. Kramat Raya No.98, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
[2,3,4)]Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KORESPONDENSI

Penulis: Zulkarnain
Email: zulkarnain.utama@gmail.com

LICENSE

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOI: https://doi.org/10.55122/kom57.v7i2.2363

I. PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia secara fundamental. Jika sebelumnya media massa konvensional menjadi aktor dominan dalam membentuk agenda politik, saat ini podcast berkembang sebagai medium alternatif yang memungkinkan penyampaian informasi, argumentasi, dan interpretasi politik secara lebih mendalam, dialogis, serta relatif bebas dari keterbatasan durasi sebagaimana media penyiaran konvensional. Karakteristik tersebut menjadikan podcast tidak hanya sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna yang mempertemukan host, narasumber, dan audiens dalam proses pembentukan realitas politik. Melalui narasi yang panjang, penggunaan data pendukung, pengalaman personal narasumber, hingga interpretasi terhadap berbagai peristiwa politik, podcast membentuk ruang publik digital yang semakin berpengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat mengenai isu-isu kebangsaan dan dinamika kekuasaan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa podcast telah mengalami transformasi dari sekadar media hiburan menjadi salah satu instrumen komunikasi politik yang memiliki daya pengaruh terhadap konstruksi opini publik (Panuju, 2023, hlm. 53–66).

Pada akhirnya, media digital tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang hanya menyampaikan fakta, melainkan sebagai arena representasi yang aktif membangun realitas sosial dan politik. Setiap pemilihan tema, narasumber, struktur pertanyaan, teknik penyajian, hingga penekanan terhadap bagian tertentu dari suatu peristiwa merupakan bentuk konstruksi komunikasi yang menghasilkan makna tertentu bagi khalayak. Dengan kata lain, komunikasi politik berlangsung melalui proses representasi yang memungkinkan media membentuk cara publik memahami aktor politik, institusi negara, maupun hubungan kekuasaan di balik suatu peristiwa. Podcast sebagai produk komunikasi digital memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan media berita konvensional karena mampu menghadirkan percakapan yang lebih panjang, argumentatif, dan interpretatif, sehingga membuka ruang bagi terbentuknya berbagai representasi mengenai dinamika politik yang sedang berlangsung (Panuju, 2023, hlm. 58–61).

Berbagai podcast tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga melakukan seleksi isu, menentukan sudut pandang, membangun kredibilitas narasumber, serta menghadirkan interpretasi tertentu terhadap berbagai dinamika politik nasional. Dalam perspektif komunikasi politik, proses tersebut merupakan bagian dari pembentukan realitas politik melalui representasi media. Dengan demikian, setiap narasi yang muncul dalam podcast sesungguhnya tidak berdiri sebagai realitas objektif, melainkan sebagai hasil konstruksi komunikasi yang dipengaruhi oleh perspektif media, host, narasumber, maupun konteks sosial politik ketika podcast tersebut diproduksi (Panuju, 2023; Kartika, Amal, & Subagio, 2026).

Salah satu fenomena yang menarik perhatian publik pada bulan Juli 2026 adalah episode Podcast *Madilog Forum Keadilan* yang membahas penggeledahan oleh POLRI dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Dalam episode tersebut, diskusi berkembang tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mengonstruksi berbagai narasi mengenai hubungan antarlembaga negara, posisi aktor-aktor politik, kemungkinan adanya lobi politik, negosiasi elit, serta konfigurasi kekuasaan yang diasumsikan berada di balik peristiwa tersebut. Narasi yang dibangun melalui dialog antara host dan narasumber menunjukkan bahwa podcast berfungsi sebagai ruang interpretasi politik yang menghadirkan berbagai kemungkinan makna atas suatu peristiwa nasional. Dalam konteks tersebut, fokus penelitian ini bukanlah menguji kebenaran materiil dari berbagai pernyataan yang disampaikan, melainkan mengkaji bagaimana representasi mengenai lobi dan negosiasi elit politik dibangun melalui praktik komunikasi dalam podcast.

Representasi menjadi konsep penting dalam penelitian komunikasi karena media tidak pernah sekadar mencerminkan realitas, melainkan membentuk realitas melalui proses seleksi, penekanan, pengulangan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, representasi mengenai lobi dan negosiasi elit politik dalam podcast tidak dapat dipahami sebagai deskripsi faktual mengenai aktivitas politik yang sesungguhnya, tetapi sebagai konstruksi komunikasi yang membentuk cara khalayak memaknai hubungan kekuasaan antaraktor politik. Dalam perspektif komunikasi politik, representasi semacam ini memiliki implikasi yang besar karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai legitimasi institusi, kredibilitas aktor politik, maupun dinamika hubungan antarlembaga negara (Kartika et al., 2026).

Dalam perspektif komunikasi politik, media digital memiliki kemampuan untuk membangun realitas politik melalui proses representasi. Representasi tidak dipahami sebagai cerminan realitas secara objektif, melainkan sebagai proses produksi makna melalui bahasa, simbol, narasi, dan praktik komunikasi. Oleh karena itu, setiap narasi politik yang disampaikan media merupakan hasil seleksi terhadap berbagai fakta, penonjolan aspek tertentu, serta penghilangan aspek lain sehingga menghasilkan makna tertentu bagi khalayak. Podcast

politik memiliki karakter yang unik karena proses representasi tersebut berlangsung melalui percakapan yang tampak spontan, padahal secara komunikasi dibangun melalui pemilihan narasumber, penyusunan alur diskusi, penekanan isu, dan penggunaan berbagai perangkat retorika yang memperkuat interpretasi audiens terhadap suatu peristiwa politik.

Penelitian mengenai podcast politik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Panuju (2023) menegaskan bahwa podcast politik telah memberikan ruang yang lebih luas bagi gagasan politik dibandingkan media penyiaran konvensional. Di sisi lain, Hamid, Yudhapramesti, dan Bakry (2024) lebih menitikberatkan analisis pada keseimbangan konten (*balance of content*) dalam Podcast *Bocor Alus Politik* Tempo terkait isu Pemilu Presiden 2024. Sementara itu, Kartika, Amal, dan Subagio (2026) mengkaji representasi kemarahan publik dalam podcast politik melalui pendekatan framing Robert Entman. Kesamaan dari berbagai penelitian tersebut adalah memosisikan podcast sebagai media komunikasi politik yang memengaruhi pembentukan opini publik, meskipun fokus analisisnya masih berada pada framing, keseimbangan isi, maupun fungsi jurnalistik podcast.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji representasi lobi dan negosiasi elit politik dalam narasi podcast. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada proses pembingkaian isu, fungsi media, atau representasi tokoh politik secara individual. Padahal, komunikasi politik kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antarelit sering kali direpresentasikan melalui berbagai narasi mengenai komunikasi informal, kompromi politik, pertukaran kepentingan, maupun dinamika relasi kekuasaan yang tidak selalu dapat diamati secara langsung. Podcast kemudian menjadi medium yang menghadirkan representasi atas proses-proses tersebut melalui interpretasi narasumber, pengalaman empiris, serta konstruksi narasi yang dibangun selama diskusi berlangsung. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak mendapat perhatian dalam kajian komunikasi politik di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memosisikan Podcast *Madilog Forum Keadilan* bukan sebagai sumber fakta hukum, melainkan sebagai teks komunikasi politik yang merepresentasikan dinamika lobi dan negosiasi elit melalui narasi yang dibangun oleh host dan narasumber. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk menguji benar atau salahnya substansi yang disampaikan dalam podcast, melainkan menganalisis bagaimana praktik komunikasi menghasilkan representasi mengenai hubungan kekuasaan, legitimasi institusi, dan posisi aktor politik dalam ruang publik digital. Pendekatan ini menempatkan podcast sebagai objek kajian komunikasi yang memiliki kemampuan membangun makna sosial dan politik melalui proses representasi.

Secara akademik, penelitian ini menawarkan dua bentuk kebaruan (*novelty*). *Pertama*, penelitian memperluas kajian komunikasi politik digital dengan mengangkat konsep representasi lobi dan negosiasi elit politik, yang hingga kini masih relatif jarang dikaji dalam penelitian podcast di Indonesia. *Kedua*, penelitian memosisikan podcast sebagai arena produksi representasi politik, bukan sekadar media penyampai informasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi komunikasi yang disampaikan dalam podcast, tetapi juga mengungkap bagaimana narasi komunikasi tersebut membentuk persepsi publik mengenai relasi kekuasaan, legitimasi institusi, dan dinamika elite politik.

Kajian lain dilakukan oleh Sadiyah, Anshori, dan Sastromiharjo (2025) yang mengkaji konstruksi realitas politik hukum Indonesia dalam Podcast *Bocor Alus Politik* Tempo melalui pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa podcast mampu membangun konstruksi realitas politik hukum melalui pilihan bahasa, strategi naratif, dan konteks sosial yang melatarbelakangi pembentukan wacana. Fokus utama penelitian berada pada konstruksi politik hukum sehingga belum menguraikan bagaimana praktik komunikasi informal, seperti lobi dan negosiasi antarelit, direpresentasikan dalam narasi podcast. Sementara itu, Suhaeb, Amsal, dan Wahda (2025) menganalisis peran politik media melalui Podcast *Bocor Alus Politik* selama Pemilu Presiden 2024. Dengan menggunakan analisis konten kualitatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa podcast berfungsi sebagai arena pembentukan opini publik dan penguatan diskursus demokrasi melalui penyajian isu-isu politik secara kritis. Penelitian tersebut menegaskan bahwa podcast telah menjadi bagian penting dari praktik komunikasi politik digital di Indonesia, namun belum mengembangkan analisis mengenai representasi hubungan kekuasaan dan komunikasi elite politik sebagai fokus utama penelitian.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian podcast politik di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan mengenai fungsi podcast sebagai media komunikasi politik, objektivitas jurnalistik, framing media, kritik terhadap pemerintah, pembentukan opini publik, serta konstruksi

realitas politik. Belum banyak penelitian yang secara khusus menjadikan representasi lobi dan negosiasi elit politik sebagai fokus analisis, terutama dalam konteks podcast sebagai media komunikasi politik digital. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu bagaimana podcast merepresentasikan dinamika komunikasi informal antarelit melalui narasi, pilihan argumentasi, struktur dialog, dan strategi penyajian pesan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memosisikan Podcast *Madilog Forum Keadilan* sebagai teks komunikasi politik yang merepresentasikan lobi dan negosiasi elit politik dalam ruang publik digital.

Teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena fokus penelitian bukan menguji fakta mengenai lobi dan negosiasi elit politik, melainkan memahami bagaimana fenomena tersebut direpresentasikan melalui narasi podcast. Hall (1997) menjelaskan bahwa representasi merupakan proses produksi makna (*production of meaning*) melalui bahasa, simbol, tanda, dan berbagai bentuk praktik komunikasi. Media tidak sekadar mencerminkan realitas sosial, tetapi secara aktif membentuk realitas melalui proses seleksi, penekanan, pengulangan, serta interpretasi terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, makna yang diterima khalayak bukan berasal dari realitas itu sendiri, melainkan dari proses representasi yang dibangun media. Melalui perspektif Hall, penelitian ini menganalisis bagaimana tanda, simbol, istilah, metafora, dan pola argumentasi yang digunakan dalam podcast membentuk representasi mengenai hubungan antarlembaga negara, relasi kekuasaan, maupun komunikasi informal antarelit politik. Dengan demikian, teori representasi menjadi dasar untuk memahami bagaimana makna politik diproduksi dan dikomunikasikan kepada publik melalui media digital.

Sementara itu, komunikasi politik merupakan proses penyampaian, pertukaran, dan pembentukan makna mengenai kekuasaan, kebijakan publik, maupun hubungan antaraktor politik melalui berbagai saluran komunikasi. McNair (2018) menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya mencakup komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik, tetapi juga mencakup komunikasi media yang membahas politik serta interpretasi masyarakat terhadap pesan-pesan politik yang beredar dalam ruang publik. Dengan demikian, media massa maupun media digital berfungsi sebagai aktor komunikasi politik yang berperan dalam membangun persepsi masyarakat mengenai realitas politik.

Selanjutnya lobi merupakan bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, maupun sikap aktor politik melalui interaksi formal maupun informal. Sementara itu, negosiasi politik merupakan proses komunikasi yang bertujuan mencapai kesepahaman, kompromi, atau penyelesaian konflik kepentingan di antara berbagai aktor politik. Menurut Nimmo (2005), lobi dan negosiasi merupakan bagian dari praktik komunikasi politik yang berlangsung melalui pertukaran informasi, persuasi, pembentukan koalisi, maupun komunikasi interpersonal antarelit.

Dalam praktik politik modern, proses lobi dan negosiasi tidak selalu tampak secara terbuka kepada publik. Sebaliknya, keberadaan proses tersebut sering kali diketahui melalui representasi yang dibangun media berdasarkan berbagai informasi, interpretasi, maupun analisis terhadap hubungan antarlembaga negara. Oleh karena itu, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai ada atau tidaknya komunikasi informal di balik suatu keputusan politik.

Ketiga konsep tersebut membentuk satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Teori Representasi Stuart Hall menjadi landasan utama untuk menjelaskan proses pembentukan makna dalam podcast. Teori Komunikasi Politik digunakan untuk memahami podcast sebagai medium komunikasi politik digital yang membentuk opini publik. Sementara itu, konsep lobi dan negosiasi politik digunakan sebagai kategori analisis terhadap bentuk-bentuk komunikasi yang direpresentasikan dalam narasi podcast. Integrasi ketiga perspektif ini memungkinkan penelitian menganalisis tidak hanya isi pesan yang disampaikan, tetapi juga bagaimana narasi podcast membangun representasi mengenai relasi kekuasaan, legitimasi institusi, dan dinamika komunikasi antarelit politik dalam ruang publik digital.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif (*Qualitative Content Analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur frekuensi kemunculan suatu pesan, melainkan memahami makna, pola representasi, dan konstruksi komunikasi politik yang dibangun melalui narasi podcast. Analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema komunikasi, hubungan antarkategori, serta makna yang terkandung dalam teks komunikasi secara sistematis dan kontekstual (Mayring, 2014). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana

representasi lobi dan negosiasi elit politik dikonstruksi melalui narasi Podcast *Madilog Forum Keadilan* mengenai penggeledahan oleh POLRI.

Objek penelitian adalah satu episode Podcast *Madilog Forum Keadilan* berjudul "Kolonel (Purn) Sri Radjasa: POLRI Tak Peduli Jampidsus Febrie Dekat dengan Hashim Djojohadikusumo" yang dipublikasikan melalui platform YouTube pada Juli 2026. Episode tersebut dipilih secara ***purposive*** karena secara eksplisit membahas dinamika komunikasi politik yang berkembang setelah penggeledahan yang dilakukan oleh POLRI dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pasokan batu bara. Podcast ini dipilih karena memuat diskusi yang secara intens merepresentasikan hubungan antarlembaga negara, komunikasi elite politik, serta dugaan adanya lobi dan negosiasi politik yang berkembang dalam ruang publik digital.

Unit analisis dalam penelitian ini berupa unit tematik (*thematic unit*) yang terdiri atas kalimat, paragraf, dialog, maupun segmen percakapan yang mengandung makna mengenai representasi lobi dan negosiasi elit politik. Penentuan unit analisis dilakukan berdasarkan kesatuan makna (*meaning unit*), bukan semata-mata berdasarkan jumlah kalimat atau durasi percakapan. Dengan pendekatan tersebut, setiap bagian narasi dianalisis sesuai konteks komunikasi yang melatarbelakanginya sehingga mampu menghasilkan interpretasi yang komprehensif terhadap representasi yang dibangun dalam podcast.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan observasi nonpartisipan. Dokumentasi dilakukan dengan mengunduh tayangan podcast, mentranskripsikan seluruh isi percakapan, kemudian melakukan proses reduksi terhadap bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengamati secara berulang struktur dialog, penggunaan bahasa, pilihan diksi, pola argumentasi, ekspresi verbal, serta dinamika komunikasi yang muncul selama podcast berlangsung. Proses pengamatan dilakukan secara berulang agar peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks komunikasi yang dibangun dalam podcast.

Analisis data menggunakan tahapan Qualitative Content Analysis yang dikembangkan oleh Mayring (2014**)**. Tahap pertama adalah persiapan data (preparation) melalui proses transkripsi dan pembacaan berulang terhadap seluruh isi podcast untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konteks komunikasi. Tahap kedua adalah open coding, yaitu mengidentifikasi unit-unit makna yang berkaitan dengan komunikasi politik, relasi kekuasaan, lobi politik, negosiasi elit, legitimasi institusi, serta konstruksi narasi. Tahap ketiga adalah kategorisasi (category development) dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam kategori analisis. Tahap keempat adalah abstraksi dan interpretasi, yaitu menjelaskan hubungan antarkategori berdasarkan perspektif teori representasi Stuart Hall dan teori komunikasi politik sehingga diperoleh pemahaman mengenai bagaimana podcast merepresentasikan lobi dan negosiasi elit politik.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi teori dengan membandingkan hasil analisis menggunakan perspektif representasi Stuart Hall, komunikasi politik McNair, serta konsep lobi dan negosiasi politik dari Nimmo. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah mengenai komunikasi politik digital, representasi media, dan podcast politik sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu perspektif teoritis. Proses analisis juga dilakukan secara berulang (*iterative analysis*) untuk memastikan konsistensi antarinterpretasi selama proses pengodean dan kategorisasi.

Keabsahan data mengacu pada kriteria penelitian kualitatif yang meliputi credibility, transferability, dependability**,** dan confirmability sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). *Credibility* diperoleh melalui pembacaan berulang terhadap transkrip podcast dan triangulasi teori. *Transferability* dicapai dengan memberikan deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian sehingga memungkinkan pembaca menilai relevansi temuan pada konteks lain. *Dependability* dilakukan melalui dokumentasi seluruh proses analisis secara sistematis sehingga dapat diaudit. Adapun *confirmability* dilakukan dengan menjaga keterlacakan hubungan antara data empiris, proses analisis, dan kesimpulan penelitian sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap berlandaskan pada bukti-bukti yang ditemukan dalam data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggeledahan POLRI sebagai Awal Pembentukan Narasi Politik

Dari cuplikan transkrip awal, sudah dapat diidentifikasi beberapa kode awal:

Kode	Indikasi dalam Transkrip
Loyalitas Politik	"bergeser orientasi loyalitas"
Kedekatan Elit	"dekat dengan Hashim Djojohadikusumo"

Suksesi Kekuasaan	"pergantian Jaksa Agung"
Kontestasi Elite	"Jam Intel lebih dekat ke Jokowi"
Politik Jabatan	"dipanggil Presiden terkait jabatan"
Persepsi Ancaman	"ancaman terhadap eksistensi Jampidsus"
Tarik Ulur Kekuasaan	"masih tarik ulur"

Kode-kode ini kemudian dapat dikelompokkan menjadi tema yang lebih besar seperti representasi loyalitas politik**,** representasi kontestasi elit**,** representasi politik jabatan, dan representasi negosiasi kekuasaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Podcast *Madilog Forum Keadilan* membangun representasi penggeledahan yang dilakukan oleh POLRI bukan semata-mata sebagai tindakan penegakan hukum, melainkan sebagai peristiwa yang ditempatkan dalam konfigurasi politik yang lebih luas. Representasi tersebut mulai dibangun sejak pembukaan podcast melalui pertanyaan host yang tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan kemungkinan adanya dinamika politik di balik tindakan institusional tersebut.

Host menyampaikan: *"...di negara ini tidak ada satu operasi sebesar itu yang lepas dari backup politik. Ada sesuatu di balik semua ini. Ada aktor yang bermain, ada proses yang sedang berjalan...."* Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal diskusi, host membangun kerangka interpretasi (*interpretive frame*) yang menggeser perhatian audiens dari aspek prosedural menuju aspek politik. Pilihan frasa seperti *"backup politik"*, *"aktor yang bermain"*, dan *"proses yang sedang berjalan"* bukan merupakan penyampaian fakta hukum, melainkan perangkat bahasa yang mengarahkan audiens untuk memahami penggeledahan sebagai bagian dari dinamika relasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan berfungsi sebagai instrumen representasi yang membentuk cara publik memaknai suatu peristiwa.

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa dan praktik komunikasi. Makna tidak muncul secara alamiah dari suatu peristiwa, tetapi dikonstruksi melalui proses seleksi, penekanan, dan pengorganisasian simbol-simbol komunikasi. Pada konteks podcast ini, pilihan diksi yang digunakan host membentuk representasi bahwa tindakan hukum dipahami sebagai bagian dari konfigurasi politik nasional. Oleh karena itu, audiens diarahkan untuk tidak melihat penggeledahan hanya sebagai prosedur penyidikan, tetapi sebagai peristiwa yang memiliki dimensi komunikasi politik.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi podcast tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi berkembang menjadi arena pembentukan realitas politik. Melalui strategi komunikasi yang digunakan pada bagian pembuka, podcast berhasil membangun ekspektasi audiens mengenai arah diskusi sekaligus menciptakan konteks interpretatif sebelum narasumber menyampaikan argumentasinya. Dengan demikian, representasi politik dibentuk sejak tahap pembukaan melalui konstruksi bahasa yang sistematis.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Podcast *Madilog Forum Keadilan* tidak memosisikan penggeledahan yang dilakukan oleh POLRI semata sebagai tindakan penegakan hukum. Sebaliknya, sejak awal episode, penggeledahan direpresentasikan sebagai simbol adanya perubahan konfigurasi relasi kekuasaan di tingkat elit negara. Narasi yang dibangun tidak berangkat dari uraian mengenai prosedur hukum, melainkan langsung menghubungkan tindakan kepolisian dengan isu loyalitas, pergantian jabatan strategis, dan hubungan antarelit politik. Dengan demikian, penggeledahan dikonstruksi sebagai bagian dari dinamika komunikasi politik, bukan hanya sebagai tindakan yuridis.

Representasi tersebut tampak pada pembukaan podcast ketika narasumber menyatakan: *"Polri melihat ada satu ancaman terhadap eksistensi Jampidsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu yang dikembangkan dalam podcast tidak berhenti pada tindakan penggeledahan, tetapi langsung diarahkan pada interpretasi mengenai orientasi loyalitas politik. Istilah *"bergeser orientasi loyalitas"* menjadi penanda komunikasi yang menghubungkan jabatan birokrasi dengan relasi politik. Dalam konteks ini, loyalitas direpresentasikan bukan sebagai loyalitas administratif terhadap institusi, melainkan sebagai loyalitas terhadap aktor politik tertentu. Penggunaan istilah tersebut membangun persepsi bahwa dinamika birokrasi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekuasaan yang berkembang di tingkat elit.

Analisis isi juga memperlihatkan bahwa narasi mengenai kedekatan dengan tokoh politik digunakan sebagai elemen utama dalam membangun argumentasi. Frasa *"karena ada kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo"* berfungsi sebagai penghubung yang mengaitkan proses hukum dengan jejaring elit politik. Penting dicatat bahwa dalam penelitian ini, kutipan tersebut tidak diperlakukan sebagai fakta yang diverifikasi,

melainkan sebagai objek representasi yang menunjukkan bagaimana podcast membangun makna mengenai relasi kekuasaan. Fokus penelitian berada pada cara narasi dikonstruksi, bukan pada benar atau tidaknya substansi pernyataan tersebut.

Dalam konteks podcast ini, istilah *ancaman*, *loyalitas*, dan *kedekatan* merupakan tanda-tanda komunikasi yang saling berhubungan sehingga menghasilkan representasi bahwa tindakan institusional dipahami dalam kerangka pertarungan pengaruh politik. Makna tersebut lahir bukan dari peristiwa penggeledahan itu sendiri, tetapi dari cara narasi disusun dan disampaikan kepada audiens.

Dari perspektif komunikasi politik, strategi tersebut memperlihatkan bahwa podcast berfungsi sebagai arena produksi interpretasi. Sebagaimana dijelaskan McNair (2018), media politik tidak hanya menyampaikan informasi mengenai politik, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami hubungan antara aktor, institusi, dan kekuasaan. Podcast *Madilog Forum Keadilan* menjalankan fungsi tersebut dengan membingkai penggeledahan sebagai titik masuk untuk mendiskusikan relasi elit, sehingga audiens didorong memahami peristiwa melalui perspektif komunikasi politik.

Dengan demikian, temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa representasi penggeledahan dalam podcast berfungsi sebagai simbol perubahan relasi kekuasaan. Peristiwa hukum menjadi medium naratif yang digunakan untuk mengembangkan pembahasan mengenai loyalitas politik, konfigurasi elit, dan dinamika komunikasi antarlembaga negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa podcast tidak hanya menginformasikan suatu peristiwa, tetapi juga membentuk kerangka interpretasi yang memengaruhi cara publik memahami dinamika politik.

3.2 Representasi Loyalitas Politik sebagai Simbol Negosiasi Elit

Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu representasi yang paling dominan dalam Podcast *Madilog Forum Keadilan* adalah konstruksi mengenai loyalitas politik sebagai faktor yang dipersepsikan memengaruhi hubungan antarelit dan dinamika kelembagaan. Loyalitas tidak direpresentasikan sebagai bentuk kepatuhan administratif terhadap institusi negara, tetapi sebagai orientasi politik yang diasosiasikan dengan aktor-aktor tertentu. Dalam narasi podcast, perubahan loyalitas digambarkan sebagai pemicu munculnya ketegangan politik sekaligus sebagai latar yang menjelaskan berbagai dinamika yang sedang dibahas.

Narasumber menyampaikan: *"Polri melihat ada satu ancaman terhadap eksistensi Jampidsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, Jampidsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu."* Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa narasi podcast menghubungkan tiga elemen komunikasi, yaitu loyalitas**,** kedekatan dengan aktor politik, dan jabatan strategis**.** Ketiga elemen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi disusun menjadi satu alur argumentasi yang membangun representasi bahwa perubahan orientasi loyalitas merupakan bagian dari dinamika komunikasi politik di tingkat elit. Dalam konteks penelitian ini, pernyataan tersebut dipahami sebagai representasi naratif yang dibangun oleh narasumber, bukan sebagai fakta yang diverifikasi.

Secara komunikatif, istilah *"bergeser orientasi loyalitas"* memiliki fungsi simbolik yang kuat. Frasa tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses perubahan loyalitas terjadi, tetapi cukup untuk membentuk persepsi bahwa relasi antaraktor politik bersifat dinamis dan dapat memengaruhi posisi kelembagaan. Hall (1997) menjelaskan bahwa representasi bekerja melalui sistem tanda yang menghasilkan makna tertentu. Dengan demikian, makna mengenai loyalitas dalam podcast tidak berasal dari realitas politik itu sendiri, melainkan dari cara narasi dibangun melalui pilihan bahasa dan hubungan antarsimbol. Temuan ini memperluas kajian komunikasi politik digital dengan menunjukkan bahwa podcast tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aktor politik, tetapi juga memproduksi makna mengenai bagaimana hubungan antaraktor tersebut dipersepsikan oleh publik melalui narasi yang dikembangkan selama diskusi.

Temuan lain adalah munculnya representasi konflik kelembagaan sebagai narasi utama yang dikonstruksi sejak awal podcast. Konflik tersebut tidak disampaikan secara eksplisit sebagai pertentangan institusional, melainkan dibangun melalui pola komunikasi yang menghubungkan tindakan penegakan hukum dengan dinamika relasi kekuasaan antarlembaga negara. Dengan kata lain, narasi yang berkembang dalam podcast tidak hanya menjelaskan adanya proses penggeledahan oleh POLRI, tetapi secara simultan membangun persepsi bahwa tindakan tersebut berada dalam konteks komunikasi politik yang lebih kompleks. Pada bagian pembuka podcast, host menyampaikan bahwa: *"...di negara ini tidak ada satu operasi sebesar itu yang lepas dari backup politik. Ada sesuatu di balik semua ini. Ada aktor yang bermain, ada proses yang sedang berjalan...."*

Pernyataan tersebut memiliki makna yang penting dalam perspektif komunikasi politik. Frasa *"backup politik"* dan *"aktor yang bermain"* tidak menunjuk pada individu tertentu, melainkan membentuk konstruksi simbolik bahwa tindakan institusional dipersepsikan sebagai bagian dari konfigurasi politik yang lebih luas. Bahasa yang digunakan host tidak mengarahkan audiens pada pembuktian fakta, tetapi pada pembentukan cara pandang (*frame*) bahwa setiap tindakan besar aparat penegak hukum selalu memiliki dimensi komunikasi politik yang patut diperhatikan.

Secara komunikatif, penggunaan istilah *"aktor yang bermain"* merupakan bentuk strategi simbolisasi (*symbolic communication strategy*). Simbol tersebut sengaja dibiarkan terbuka sehingga memungkinkan audiens membangun interpretasi sendiri mengenai siapa yang dimaksud sebagai aktor, bagaimana hubungan antaraktor tersebut, dan mengapa tindakan penggeledahan dipandang memiliki konsekuensi politik. Strategi semacam ini memperlihatkan bahwa podcast tidak bekerja melalui penyampaian informasi yang bersifat deklaratif, tetapi melalui pembentukan makna secara bertahap.

Perspektif Stuart Hall (1997) menjelaskan bahwa representasi merupakan proses produksi makna melalui sistem tanda (*signifying practices*). Dalam konteks penelitian ini, kata *"backup politik"* tidak memiliki makna yang tetap, tetapi memperoleh arti melalui konteks percakapan yang dibangun host. Makna tersebut lahir bukan karena adanya fakta yang disampaikan secara langsung, melainkan karena bahasa yang digunakan berhasil menghubungkan tindakan hukum dengan kemungkinan adanya komunikasi politik di baliknya. Dengan demikian, representasi konflik kelembagaan dalam podcast merupakan hasil konstruksi simbolik yang diproduksi melalui praktik komunikasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa podcast telah menjalankan fungsi yang lebih luas dibandingkan media informasi konvensional. Podcast tidak hanya menginformasikan bahwa terjadi penggeledahan, tetapi juga mengajak audiens memasuki ruang interpretasi mengenai relasi antarlembaga negara. Dalam konteks komunikasi politik digital, proses ini sangat penting karena media tidak lagi sekadar menjadi saluran informasi, melainkan menjadi arena pembentukan realitas politik. Sebagaimana dikemukakan oleh McNair (2018), komunikasi politik modern merupakan proses pembentukan makna mengenai kekuasaan melalui interaksi antara media, aktor politik, dan publik. Podcast *Madilog Forum Keadilan* memperlihatkan fungsi tersebut dengan membangun narasi yang menempatkan tindakan hukum sebagai bagian dari dinamika komunikasi kekuasaan.

Lebih jauh, representasi konflik kelembagaan dalam podcast tidak dibangun melalui narasi konfrontatif, melainkan melalui pendekatan dialogis. Host tidak menyatakan secara langsung adanya konflik, tetapi menyusun pertanyaan-pertanyaan yang membuka ruang bagi narasumber untuk mengembangkan argumentasi. Pola komunikasi semacam ini menghasilkan efek deliberatif, yaitu memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengikuti proses berpikir narasumber sebelum membentuk kesimpulan. Dengan demikian, representasi konflik tidak diproduksi melalui klaim sepihak, tetapi melalui proses argumentasi yang berkembang selama percakapan.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan karakter khas podcast sebagai media komunikasi politik digital. Berbeda dengan berita televisi yang lebih berorientasi pada penyampaian fakta secara ringkas, podcast memanfaatkan durasi yang panjang untuk membangun hubungan antarfakta melalui dialog yang berkelanjutan. Proses tersebut memungkinkan terbentuknya representasi yang lebih kompleks mengenai hubungan kekuasaan, legitimasi institusi, dan dinamika komunikasi politik. Oleh karena itu, konflik kelembagaan dalam podcast tidak hadir sebagai fakta yang harus dibuktikan, melainkan sebagai representasi yang diproduksi melalui strategi komunikasi simbolik.

3.3 Representasi Kontestasi Jabatan sebagai Arena Lobi dan Negosiasi Politik

Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi lobi politik dalam Podcast *Madilog Forum Keadilan* dibangun secara implisit melalui pola argumentasi yang menghubungkan berbagai aktor, institusi, dan peristiwa politik ke dalam satu kesatuan narasi. Menariknya, istilah "lobi" tidak selalu dinyatakan secara eksplisit oleh host maupun narasumber. Sebaliknya, representasi tersebut lahir melalui rangkaian penjelasan mengenai hubungan antarelit, kedekatan personal, dinamika kelembagaan, dan kemungkinan adanya komunikasi di luar mekanisme formal negara. Dengan demikian, podcast membentuk pemahaman bahwa praktik politik tidak semata-mata berlangsung dalam ruang institusional yang terbuka, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi informal yang tidak selalu terlihat oleh publik.

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa podcast merepresentasikan jabatan publik sebagai arena kontestasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi antarelit. Dalam narasi yang

berkembang, pembahasan mengenai kemungkinan pergantian pejabat strategis selalu dihubungkan dengan hubungan personal, dukungan politik, maupun kedekatan dengan aktor tertentu. Dengan demikian, jabatan direpresentasikan bukan hanya sebagai posisi administratif, tetapi sebagai objek komunikasi politik yang melibatkan proses negosiasi kepentingan.

Narasumber menyatakan: *"...loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi. Kalau dia jadi Jaksa Agung selesai ini urusan kemungkinan akan digantinya Jaksa Agung."* Pada bagian lain narasi juga disebutkan: *"Dan tadi Bapak juga mengatakan selain Jampidsus ini ada calon lain ada yang namanya Jam Intel. Jam Intel ini lebih dekat ke Jokowi. Jam Intel ini ada iparnya Dasco. Ada upaya Dasco untuk menggolkan ini."*

Dua kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana podcast membangun representasi mengenai proses pergantian jabatan melalui narasi hubungan antarelit. Kata-kata seperti *"lebih dekat"*, *"calon lain"*, dan *"ada upaya menggolkan"* merupakan penanda komunikasi yang mengarahkan audiens pada pemaknaan bahwa proses pengisian jabatan strategis tidak hanya dipahami melalui prosedur formal, tetapi juga melalui hubungan komunikasi politik di antara aktor-aktor yang disebutkan dalam podcast.

3.4 Representasi Jaringan Elit Politik

Hasil analisis menunjukkan bahwa Podcast *Madilog Forum Keadilan* merepresentasikan jaringan elit politik sebagai salah satu elemen utama dalam memahami dinamika politik nasional. Jaringan tersebut tidak direpresentasikan melalui struktur organisasi formal, tetapi melalui narasi mengenai kedekatan personal, hubungan kekeluargaan, serta komunikasi antartokoh yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap proses politik. Dalam konstruksi tersebut, hubungan antaraktor menjadi simbol yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dipersepsikan bekerja di balik ruang formal kelembagaan.

Representasi tersebut tampak ketika narasumber menjelaskan mengenai kemungkinan pergantian Jaksa Agung dan mengaitkannya dengan hubungan beberapa tokoh politik:*"...selain Jampidsus ini ada calon lain ada yang namanya Jam Intel. Jam Intel ini lebih dekat ke Jokowi. Jam Intel ini ada iparnya Dasco. Ada upaya Dasco untuk menggolkan ini...."*

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa narasi podcast membangun hubungan simbolik antara jabatan, kedekatan personal, dan dukungan politik. Penggunaan frasa *"lebih dekat"*, *"iparnya"*, dan *"ada upaya menggolkan"* berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang menghubungkan relasi personal dengan kemungkinan proses politik. Dalam konteks penelitian ini, unsur-unsur tersebut dipahami sebagai strategi representasi, yaitu cara podcast menyusun makna mengenai jaringan elit melalui asosiasi antartokoh yang disebutkan dalam percakapan.

Temuan ini menunjukkan bahwa Podcast *Madilog Forum Keadilan* menggunakan strategi komunikasi yang menempatkan jaringan elit sebagai kerangka interpretasi utama dalam menjelaskan dinamika politik. Akibatnya, audiens tidak hanya menerima informasi mengenai aktor politik, tetapi juga memperoleh representasi mengenai bagaimana relasi antaraktor dipersepsikan memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

3.5 Representasi Politik Jabatan

Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa podcast merepresentasikan jabatan publik sebagai arena komunikasi strategis yang sarat dengan proses persuasi, legitimasi, dan negosiasi politik. Jabatan tidak diposisikan sebagai hasil prosedur administratif semata, tetapi sebagai ruang komunikasi yang mempertemukan berbagai kepentingan politik.

Hal tersebut terlihat ketika narasumber menyatakan:*"...ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, Jampidsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu...."* Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai jabatan dibangun melalui narasi komunikasi antara aktor politik dan lembaga negara. Istilah *"dipanggil Presiden"* serta *"terkait dengan jabatan"* menjadi penanda komunikasi yang menunjukkan bahwa proses politik direpresentasikan sebagai hasil interaksi antarelit, bukan hanya melalui mekanisme birokrasi formal.

Interpretasi tersebut sejalan dengan konsep Hall (1997) mengenai representasi sebagai proses produksi makna. Dalam konteks ini, jabatan tidak dimaknai hanya sebagai posisi organisasi, tetapi sebagai simbol yang merepresentasikan legitimasi, kekuasaan, dan hubungan antarelit. Podcast membangun makna tersebut melalui struktur dialog yang memungkinkan audiens menghubungkan berbagai informasi menjadi satu kesatuan narasi politik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa Podcast *Madilog Forum Keadilan* berfungsi sebagai arena komunikasi politik digital yang mengonstruksi jabatan publik sebagai objek representasi politik. Dengan demikian, pembahasan mengenai pergantian jabatan tidak dipahami sebagai informasi administratif semata, melainkan sebagai narasi mengenai proses komunikasi strategis yang berkembang di antara para aktor politik.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat diidentifikasi lima kategori representasi komunikasi politik yang dominan dalam Podcast *Madilog Forum Keadilan*, yaitu:

Kategori Representasi	Indikator Utama	Makna Komunikasi
Representasi Penggeledahan	Penggeledahan dikaitkan dengan konfigurasi politik	Peristiwa hukum dipahami dalam konteks komunikasi politik
Representasi Loyalitas Politik	Pergeseran loyalitas, kedekatan aktor	Loyalitas menjadi simbol distribusi pengaruh
Representasi Lobi Politik	Hubungan informal antarelit	Lobi diproduksi sebagai konstruksi komunikasi
Representasi Jaringan Elit	Kedekatan personal dan jejaring aktor	Jaringan menjadi simbol relasi kekuasaan
Representasi Politik Jabatan	Pergantian jabatan, komunikasi strategis	Jabatan dimaknai sebagai arena negosiasi politik

Kelima kategori tersebut menunjukkan bahwa representasi komunikasi politik dalam podcast dibangun secara bertahap melalui hubungan antarsimbol, struktur dialog, dan pengembangan argumentasi. Podcast tidak hanya menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa politik, tetapi juga memproduksi makna mengenai bagaimana relasi kekuasaan dipersepsikan oleh publik dalam ruang komunikasi digital.

Dalam perspektif komunikasi politik, strategi semacam ini merupakan bentuk konstruksi konteks (*contextual construction*). Host tidak menyampaikan kesimpulan, melainkan membangun konteks yang memungkinkan narasumber mengembangkan argumentasi mengenai hubungan antara aktor politik, lembaga negara, dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, komunikasi tidak diarahkan untuk membuktikan fakta tertentu, tetapi untuk membentuk ruang interpretasi yang memungkinkan berbagai kemungkinan makna berkembang selama percakapan berlangsung.

Hasil penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa representasi lobi politik dalam podcast memiliki karakter yang berbeda dengan pemberitaan jurnalistik. Dalam berita, lobi politik umumnya hanya diberitakan apabila terdapat fakta atau pernyataan resmi yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, podcast memungkinkan berkembangnya diskusi yang bersifat analitis dan interpretatif sehingga lobi politik hadir sebagai objek representasi, bukan sebagai fakta yang diklaim benar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa podcast lebih menonjolkan fungsi interpretatif daripada fungsi informatif.

Temuan ini juga memperluas hasil penelitian Panuju (2023) yang menegaskan bahwa podcast memberikan ruang argumentasi yang lebih luas dibandingkan media penyiaran konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluasan ruang tersebut tidak hanya menghasilkan diskusi yang lebih panjang, tetapi juga memungkinkan terbentuknya representasi mengenai praktik komunikasi politik yang tidak mudah diamati secara langsung. Dengan demikian, podcast berfungsi sebagai medium yang menghubungkan fakta empiris, interpretasi narasumber, dan imajinasi politik audiens ke dalam satu ruang diskursif yang saling berkaitan.

Menurut Hall (1997), media membentuk realitas sosial melalui praktik representasi yang menghubungkan tanda-tanda menjadi sistem makna tertentu. Dalam konteks podcast ini, istilah *"calon lain"*, *"lebih dekat"*, *"iparnya"*, dan *"ada upaya menggolkan"* membentuk jaringan tanda yang menghasilkan representasi mengenai negosiasi elit. Makna tersebut tidak berada pada masing-masing istilah secara terpisah, melainkan lahir melalui hubungan antartanda yang dibangun secara berurutan selama percakapan berlangsung.

Dari perspektif komunikasi politik, representasi negosiasi elit memperlihatkan bahwa podcast berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan publik memahami politik melalui dimensi komunikasi, bukan hanya melalui dimensi kelembagaan. Sebagaimana dijelaskan McNair (2018), komunikasi politik modern merupakan proses produksi makna mengenai kekuasaan melalui interaksi antara media, aktor politik, dan publik. Podcast *Madilog Forum Keadilan* menjalankan fungsi tersebut dengan mengonstruksi negosiasi sebagai proses komunikasi yang dipersepsikan memengaruhi distribusi kekuasaan.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Podcast *Madilog Forum Keadilan* membangun representasi komunikasi politik melalui konstruksi narasi yang menempatkan penggeledahan oleh POLRI sebagai titik masuk untuk mendiskusikan dinamika relasi kekuasaan, lobi politik, dan negosiasi elit. Berdasarkan analisis isi kualitatif, ditemukan bahwa podcast tidak hanya menyajikan informasi mengenai suatu peristiwa politik, tetapi juga memproduksi makna melalui pilihan bahasa, struktur dialog, argumentasi narasumber, dan strategi framing yang dikembangkan oleh host. Dengan demikian, podcast berfungsi sebagai arena representasi komunikasi politik yang membentuk cara audiens memahami hubungan antara institusi negara, aktor politik, dan distribusi kekuasaan.

Hasil penelitian mengidentifikasi lima bentuk representasi yang dominan, yaitu (1) representasi penggeledahan sebagai simbol perubahan konfigurasi kekuasaan, (2) representasi loyalitas politik sebagai indikator perubahan orientasi relasi elit, (3) representasi lobi politik sebagai konstruksi komunikasi informal antarelit, (4) representasi jaringan elit sebagai simbol distribusi pengaruh politik, dan (5) representasi negosiasi elit sebagai mekanisme komunikasi strategis dalam proses politik. Kelima representasi tersebut dibangun melalui hubungan antarsimbol komunikasi yang berkembang secara bertahap sepanjang diskusi sehingga menghasilkan konstruksi makna politik yang kompleks.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan Model Representasi Lobi dan Negosiasi Elit Politik dalam Podcast Politik Digital yang menjelaskan bahwa pembentukan makna politik berlangsung melalui lima tahapan komunikasi, yaitu peristiwa politik, framing host, produksi representasi oleh narasumber, interpretasi audiens, dan pembentukan persepsi politik. Model ini memperluas kajian komunikasi politik digital dengan menempatkan podcast bukan hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi sebagai ruang produksi makna yang membentuk konstruksi relasi kekuasaan di ruang publik digital.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, baik secara akademik maupun praktis.

Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan representasi komunikasi politik pada berbagai podcast politik di Indonesia, seperti *Madilog Forum Keadilan*, *Bocor Alus Tempo*, maupun podcast politik lainnya. Pendekatan komparatif tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan strategi framing, representasi kekuasaan, dan konstruksi opini publik pada masing-masing platform podcast. Penelitian berikutnya juga disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan analisis isi, analisis wacana kritis, serta penelitian resepsi audiens (*audience reception analysis*). Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi representasi yang dibangun media, tetapi juga memahami bagaimana khalayak menafsirkan, menerima, atau bahkan menolak representasi tersebut dalam konteks komunikasi politik digital.

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan model konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini melalui pengujian empiris menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya untuk mengukur pengaruh representasi lobi politik terhadap pembentukan persepsi publik, kepercayaan terhadap institusi negara, maupun sikap politik masyarakat. Dengan demikian, model representasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki kontribusi konseptual, tetapi juga memperoleh validasi empiris yang lebih kuat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelola podcast politik agar semakin memperhatikan keseimbangan penyajian informasi, transparansi argumentasi, serta pemisahan yang jelas antara fakta, opini, dan interpretasi. Podcast sebagai ruang diskusi publik memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan persepsi masyarakat sehingga penyusunan narasi, pemilihan narasumber, dan strategi framing perlu dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip komunikasi publik yang demokratis.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan literasi media dan literasi komunikasi politik dalam mengonsumsi konten podcast. Publik perlu memahami bahwa podcast merupakan ruang representasi yang memproduksi makna melalui proses komunikasi, sehingga informasi yang disampaikan perlu dikaji secara kritis dengan membandingkan berbagai sumber informasi lain. Sikap kritis tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ruang.

REFERENSI

Ahmadi, D., & Pratiwi, A. (2022). Komunikasi politik digital dan pembentukan opini publik di media sosial. *Jurnal ASPIKOM, 7*(2), 145–160.

Anshari, F., & Nugroho, C. (2024). Political podcast as a digital public sphere: A qualitative content analysis of Indonesian political communication. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 40*(1), 180–198.

Arifin, A., & Kurniawan, D. (2023). Media digital, framing, dan komunikasi politik pada era konvergensi. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 21*(2), 167–183.

Dewi, S. I., Artaria, M. D., Wahyudi, I., & Ostaszewska, A. (2026). Voicing the body: Postcolonial feminist praxis and narratives of body autonomy in Indonesian women's podcasts. *Women's Studies International Forum, 117*, Article 103331. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2026.103331

Elsa, M., & Ma'arif, M. S. (2026). Interpersonal rhetoric analysis of Deddy's podcast with Prabowo: Message construction in relational speaking style. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, 9*(2), 120–142. https://doi.org/10.24176/kredo.v9i2.16575

Fahlevi, F., & Nusa, M. Z. R. (2026). Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap komunikasi politik pemerintah dalam Podcast *Bocor Alus Politik Tempo*. *Jurnal Penelitian Inovatif, 6*(1), 359–370. https://doi.org/10.54082/jupin.1699

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.

Hamid, A., Yudhapramesti, P., & Bakry, U. S. (2024). Balance of content pada Podcast *Bocor Alus Politik* dalam pemberitaan Pemilu Presiden 2024. *Jurnal Komunikasi Indonesia, 13*(1), 32–47.

Hidayat, R., & Setiawan, A. (2022). Podcast sebagai media komunikasi politik digital di Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi, 10*(2), 210–225.

Irwansyah, Y. H. S., & Irwansyah. (2021). The rise of podcast in Indonesia: The development of new media podcast as popular culture of young generation in Indonesia. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4*(1), 223–233. https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.1034

Jones, R., Zamani, H., Schedl, M., Chen, C.-W., Reddy, S., Clifton, A., Karlgren, J., Hashemi, H., Pappu, A., Nazari, Z., Yang, L., Semerci, O., Bouchard, H., & Carterette, B. (2021). Current challenges and future directions in podcast information access. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2106.09227

Kartika, M. M. P., Amal, M. I., & Subagio, E. K. S. (2026). Dari ruang digital ke ruang publik: Representasi kemarahan publik dalam Podcast *Bocor Alus Politik*. *Journal of Communication Sciences, 8*(2), 136–149. https://doi.org/10.55638/jcos.v8i2.2164

Kusuma, R., & Sari, D. (2023). Representasi politik dalam media digital: Pendekatan teori representasi Stuart Hall. *Jurnal Penelitian Komunikasi, 26*(1), 57–73.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

Maulana, R., & Prasetyo, B. (2025). Digital political communication and podcast journalism in Indonesia. *Journal of Communication Inquiry, 49*(1), 55–73.

Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Klagenfurt.

McNair, B. (2018). *An Introduction to Political Communication* (6th ed.). Routledge.

Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2021). *Reuters Institute Digital News Report 2021*. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021

Nimmo, D. (2005). *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing.

Nugroho, I., & Irwansyah. (2021). Konvergensi konten audio di media online (Studi kasus Podcast Detik.com). *Jurnal Komunikasi, 15*(1), 55–70. https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i1.9753

Panuju, R. (2023). *Podcast Politik Indonesia: Upaya Mencari Calon Presiden Indonesia 2024*. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 53–66. https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.222

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.

Prabowo, A., & Lestari, M. (2024). Elite political communication in Indonesian digital media. *Jurnal Studi Komunikasi, 8*(3), 412–429.

Rahmawati, E., & Wibowo, T. (2023). Representasi relasi kekuasaan dalam media digital: Analisis komunikasi politik kontemporer. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 8*(1), 88–104.

Sari, N., & Purnomo, H. (2022). Digital public sphere and political discourse on YouTube podcast. *Jurnal Komunikasi Global, 11*(2), 134–149.

Sediyaningsih, S., Tri Hariyanto, I., Irmayati, I., & Adning, M. (2026). Podcast-based learning and organizational communication in the public sector: A mixed-methods analysis. *Frontiers in Communication, 11*, Article 1827936. https://doi.org/10.3389/fcomm.2026.1827936

Simbolon, Y. Y. (2026). Analyzing communication strategies KPU Sergai podcast as digital public communication for electoral education. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication), 11*(2), 1309–1324. https://doi.org/10.18326/inject.v11i2.6713

Susanto, E., & Yulianto, R. (2025). Political branding through podcast communication: A study of issue framing in Indonesia. *Journal of Political Marketing, 24*(2), 145–164.

Wijaya, A., & Firmansyah, D. (2024). Komunikasi politik digital dan representasi kekuasaan pada platform podcast. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 28*(1), 77–95.